

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumara, Noorsyamsa, dkk, 2009, Standar Pelayanan Publik, Langkah-langkah Penyusunan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Dwiyanto, Agus, 2014, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, Yogyakarta.

Nashuddin, 2016, Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik, Sanabil, Mataram.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2013, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sirajuddin, dkk, 2011, Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang.

Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung.

Taufiqurokhman dan Evi Satispi, 2018, Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik, UMJ Press, Tangerang Selatan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI No. 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4674. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI No. 112 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yaitu sebagai pejabat penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Peraturan MENPAN No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 33 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Publikasi Ilmiah

Andi Siswan Nawir, 2008, Peran Camat Dalam Koordinasi Pada Bidang Pembangunan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Mohammad Nurhadariant Saputra, dkk., Peran Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, eJournal Ilmu Pemerintahan Vol.5(4), 2017.

Prasetyo Adi Setiawan, 2019, Peran Camat Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, Skripsi, Fakultas Hukum UGM.

Rifky Angga Noersakti, 2016, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan di Kabupaten Purworejo Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Skripsi, Fakultas Hukum UGM.

Internet

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020, “Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pemerintahan di Masa Pandemi Covid-19”, Diakses dari www.dprd-diy.go.id pada tanggal 22 September 2020.

Kementerian Dalam Negeri, 2019, “Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)” diakses dari <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id> pada tanggal 15 Februari 2021.

Tri, 2020, “Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogya Optimalkan Layanan WA”, Diakses dari www.harianmerapi.com pada tanggal 30 Oktober 2020.